

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
TAHUN ANGGARAN 2020
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Laporan Keuangan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu tahun pelaporan (Tahun Anggaran 2020). Laporan keuangan Bagian Administrasi Perekonomian terutama digunakan untuk membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Bagian Administrasi perekonomian antara lain untuk :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku;
3. menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan di Bagian Administrasi Perekonomian serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. menyediakan informasi mengenai bagaimana Bagian Administrasi Perekonomian membiayai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

1.2. Landasan Hukum

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;

- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Kabupaten Bantul Nomor 914/025/DPA/PPKD/2020 tanggal 31-12-2019
- g. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 914/252/DPPA/PPKD/2020 tanggal 11 Nopember 2020.

1.3. Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I. Pendahuluan

- 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD OPD

- 1. Ekonomi Makro
- 2. Kebijakan Keuangan
- 3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

- 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
- 2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 1. Entitas Akuntansi/entitas pelaporan keuangan dari OPD
- 2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
- 3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
- 4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah dalam OPD

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan OPD

- 1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan OPD

Bab VI. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan OPD

Bab VII. Penutup

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA OPD

1. Ekonomi Makro

Bagian Administrasi perekonomian merupakan Unit Kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Pada Tahun Anggaran 2020 anggaran belanja SKPD Nomor 914/025/DPA/PPKD/2020 tanggal 31-12-2019 di Bagian Administrasi Perekonomian sebesar **Rp1.102.976.260** (Satu milyar seratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah). Melalui perubahan anggaran SKPD Nomor 914/252/DPPA/PPKD/2020 tanggal 11 Nopember 2020 belanja di Bagian Administrasi Perekonomian sebesar **Rp595.074.831,-** (Lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dengan 3 program sebanyak 13 kegiatan realisasi anggaran Rp511.126.683,-(Lima ratus sebelas juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) prosentase mencapai 85,89%

2. Kebijakan Keuangan

Secara umum pelaksanaan keuangan meliputi perencanaan keuangan / penganggaran yang disusun berdasarkan kebutuhan sesuai dengan Tupoksi di Bagian Administrasi perekonomian.

Setelah penganggaran adalah realisasi keuangan yang merupakan kebijakan untuk pembiayaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan

Tahapan terakhir dari kebijakan keuangan tersebut adalah penyusunan laporan keuangan dan laporan lain yang terkait dengan keuangan. Penyusunan laporan keuangan meliputi : laporan setiap bulannya dan laporan pada akhir tahun. Sedangkan laporan yang terkait dengan keuangan seperti laporan Neraca, laporan pajak dan laporan realisasi fisik dan keuangan

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja OPD

Pengukuran indikator keberhasilan meliputi mekanisme sistem perencanaan yang terdiri input, proses dan keluaran / out put yang kemudian ada tanggapan yang feed back/umpan balik yang menjadi dasar evaluasi pelaksanaan 3 program dengan 13 kegiatan. Program di Bagian Administrasi Perekonomian dijabarkan ke dalam : 13 kegiatan. Secara umum kegiatan di Bagian Administrasi Perekonomian dapat dilaksanakan dengan lancar dan meskipun ada kegiatan yang tidak mencapai target sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Pencapaian target kinerja Bagian Administrasi Perekonomian dapat diuraikan ke dalam bagan sebagai berikut :

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Bagian Adm. Perekonomian

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Rupiah (sebelum perubahan)	Pagu Anggaran Rupiah (setelah perubahan)	Realisasi	
				Rupiah	%
1	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Rp118.791.700,-	Rp118.791.700,-	Rp.117.291.300,-	98,72
2	Penyediaan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Rp163.175.400,-	Rp.58.633.588,-	Rp58.355.000,-	99,52
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp48.894.160,-	Rp48.894.160,-	Rp48.865.000,-	99,94
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Rp10.000.000,-	0	0	
5	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp53.175.000,-	Rp17.725.000,-	Rp17.725.000,-	100
6	Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat	Rp52.100.000,-	Rp52.100.000,-	Rp52.095.000,-	99,99
7	Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp62.380.000,-	Rp5.775.000,-	Rp5.775.000,-	100
8	Kajian Pengembangan sarana dan prasana ekonomi masyarakat	Rp52.100.000,-	0	0	
9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	Rp97.200.000,-	Rp.10.657.500,-	Rp.10.657.500,-	100
10	Monitoring dan Evaluasi kebijakan	Rp38.940.000,-	Rp5.200.000,-	Rp5.200.000,-	100

	Sarana Prasarana Ekonomi Masyarakat				
11	Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	Rp318.945.000,-	Rp204.572.883,-	Rp122.487.883,-	59,87
12	Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	Rp52.100.000,-	Rp52.100.000,-	Rp52.095.000,-	99,99
13	Monitoring dan Evaluasi kebijakan Lembaga Ekonomi daerah	Rp47.575.000,-	Rp20.625.000,-	Rp20.600.000,-	99,88
	Jumlah	1.031.114.500	Rp595.074.831,-	Rp511.126.683,-	85,89

2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Ada beberapa kendala yang dihadapi di Bagian Administrasi Perekonomian antara lain :

1. Dalam pencapaian target Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah, yaitu tidak terlaksanannya Seleksi Direktur Aneka Dharma dan Seleksi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamansari, ini terjadi karena perlu ada pembenahan intern dan konsolidasi BUMD terlebih dahulu.
2. Dalam pencapaian target kajian peraturan perundang-undangan daerah tidak ada kendala
3. Kegiatan penyusunan Rencana Kerja OPD tidak dilaksanakan karena sudah menjadi satu dengan Sekretariat Daerah.

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi.

Entitas akuntansi dipahami sebagai unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib menyampaikan laporan keuangan

Berdasarkan pemahaman tersebut maka menurut Peraturan Bupati Bantul No. 141 Tahun 2018 Bab V pasal 38 menyatakan bahwa Bagian Administrasi Perekonomian termasuk dalam lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian sarana Perekonomian, Sub Bagian BUMD dan LKM serta Sub Bagian Produktivitas Perekonomian.

2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan pelaporan keuangan Bagian Administrasi Perekonomian.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan pelaporan keuangan Bagian Administrasi Perekonomian adalah basis kas untuk menentukan pagu anggaran,

belanja dan pembiayaan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran. Pada dasarnya penyusunan pelaporan keuangan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan di Bagian Administrasi Perekonomian adalah berdasarkan pada pagu anggaran yang dituangkan dalam DPA tahun berjalan. DPA tersebut dijadikan pedoman dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan selain juga mengacu pada rencana kerja tahunan dan standarisasi harga barang dan jasa.

4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah dalam OPD.

Untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Bagian Administrasi Perekonomian semua didasarkan pada standar akuntansi pemerintah dalam OPD.

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Bagian Administrasi Perekonomian. :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Rupiah (setelah perubahan)	Realisasi	
			Rupiah	%
1	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Rp118.791.700,-	Rp.117.291.300,-	98,72
2	Penyediaan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Rp.58.633.588,-	Rp58.355.000,-	99,52
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp48.894.160,-	Rp48.865.000,-	99,94
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	0	0	
5	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp17.725.000,-	Rp17.725.000,-	100
6	Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat	Rp52.100.000,-	Rp52.095.000,-	99,99
7	Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp5.775.000,-	Rp5.775.000,-	100
8	Kajian Pengembangan sarana dan prasana ekonomi masyarakat	0	0	
9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	Rp.10.657.500,-	Rp.10.657.500,-	100
10	Monitoring dan Evaluasi	Rp5.200.000,-	Rp5.200.000,-	100

	kebijakan Sarana Prasarana Ekonomi Masyarakat			
11	Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	Rp204.572.883,-	Rp122.487.883,-	59,87
12	Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	Rp52.100.000,-	Rp52.095.000,-	99,99
13	Monitoring dan Evaluasi kebijakan Lembaga Ekonomi daerah	Rp20.625.000,-	Rp20.600.000,-	99,88
	J u m l a h	Rp595.074.831,-	Rp511.126.683,-	85,89

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran untuk mendukung lancarnya kegiatan kantor Bagian administrasi Perekonomian. Anggaran sebesar Rp118.791.700,- dapat terserap sebesar Rp117.271.300,- dengan capaian keuangan 98,72%
2. Penyediaan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Maksud dan tujuan kegiatan ini mendukung rapat rutin dan perjalanan kedinasan agar dapat terlaksana dengan baik. Dengan anggaran sebesar Rp58.633.588,- dapat terserap Rp58.355.000,- dengan capaian anggaran 99,52%
3. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 dapat terpelihara dan selalu siap saat akan dipergunakan. Anggaran yang tersedia Rp48.894.160,- dan terserap Rp48.865.000,- tingkat capaian 99,94 %
4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kegiatan ini dialihkan untuk penanganan covid 19 pada refocusing pertama bulan April 2020
5. Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
Pengembangan Ekonomi Masyarakat untuk tahun ini dengan mengadakan workshop bagi para petani garam rakyat. Maksud tujuan diadakannya workshop adalah menambah pengetahuan tentang usaha garam dan memperluas peluang pemasarannya sehingga akan meningkatkan pedapatan dan kesejahteraan masyarakat. Workshop **“Pengembangan Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Bantul”**. dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020 bertempat di RM Parangtritis, Jl Parangtritis Bantul diikuti oleh 50 peserta dengan narasumber Mashuri selaku

Lurah Desa Gadingsari dengan judul materi “Peluang Usaha Garam Rakyat di Desa Gadingsari”.

Pemateri kedua adalah Upomo Yunariyanto selaku Ketua BUMDes Gadingsari dengan judul materi “Menjadi Pengolah Garam yang Handal”.

Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp17.725.000,- realisasi anggaran Rp17.725.000,- (100%) tingkat capaian kegiatan 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Workshop sebanyak 1 (Satu) kali yaitu :

6. Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat

Kajian yang disusun pada tahun anggaran 2020 ini berjudul **“Kajian Pengembangan Lahan Pertanian Melalui Intensifikasi di Kabupaten Bantul”**

Kajian Pengembangan Potensi perekonomian Bidang Pertanian dengan maksud dan tujuan

- Menyusun dokumen Kajian Pengembangan Lahan Pertanian Melalui Intensifikasi Lahan Pekarangan
- Mengidentifikasi lahan pekarangan produktif di Kabupaten Bantul
- Mengidentifikasi pengembangan usaha pertanian pada lahan pekarangan di Kabupaten Bantul
- Menyusun rekomendasi pengembangan lahan pertanian melalui intensifikasi lahan pekarangan di Kabupaten Bantul

Adapun sasaran yang akan dicapai dari penyusunan kajian ini adalah :

- Tersedianya data lahan pekarangan produktif di Kabupaten Bantul
- Teridentifikasinya potensi pengembangan usaha pertanian pada lahan pekarangan di Kabupaten Bantul
- Tersusunnya rekomendasi pengembangan lahan pertanian melalui intensifikasi lahan pekarangan di Kabupaten Bantul

Dokumen yang dihasilkan adalah Laporan pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir Hasil Kajian serta CD.

Kegiatan ini didukung anggaran Rp52.100.000,- realisasi anggaran sebesar Rp52.095.000,- prosentase keuangan mencapai 99,9 % tingkat capaian kegiatan 100%.

7. Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat merupakan kegiatan mengevaluasi kebijakan pemerintah bidang sarpras terkait 5 sektor yang menjadi fasilitas dari Bagian Administrasi Perekonomian yaitu Bidang perdagangan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui ketersediaan persediaan kebutuhan pokok dan stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama harga kebutuhan pokok jelang hari besar agama seperti Idul Fitri, Idul Qurba, Natal dan Tahun Baru.

Untuk monev TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) ini setelah dana terkena refocusing II untuk penanganan covid, kegiatan monev setelah bulan Mei didanai dengan anggaran kegiatan rutin.

Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp5.775.000,- realisasi Rp. Rp5.775.000,- prosentase mencapai 100% tingkat capaian kegiatan 100%.

Dari kegiatan tersebut diharapkan untuk dapat menyiapkan bahan rumusan sebagai bahan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian.

8. Kajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat

Tahun 2020 tidak membuat kajian, dana difocusing untuk penanganan covid19

9. Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomian Masyarakat

Bagian Adm Perekonomian merencanakan pelaksanaan penyelenggaraan workshop pada tanggal 17 Maret 2020 dengan pembicara dari Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Jogja, Bank BPD Bantul dan dari Pemda dengan tema **“Workshop Pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020”**. Workshop ini mengundang calon debitur dan pendamping Ijin Usaha Menengah Kecil dari 17 kecamatan.

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis SDM Pembina dan dan petugas Entri Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), sedianya dilaksanakan pada tanggal 24-25 Maret 2020 di Magetan Jawa Timur.

Namun pada bulan Maret tsb terbit Surat untuk tidak melaksanakan kegiatan keluar kota maupun rapat rapat karena adanya Pandemi Covid19, maka 2 sub kegiatan tersebut batal dilaksanakan.

Anggaran yang tersedia telah digunakan untuk mengadakan rapat persiapan dan rapat pemantaban, serta pembelian sarana prasana kegiatan. Anggaran sebesar Rp10.657.000,- realisasi anggaran Rp10.657.000,- (100%) tingkat capaian kegiatan 100%.

10. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat kegiatan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait Kredit usaha Rakyat dan Ekonomi Masyarakat yang menjadi fasilitasi dari Bagian Administrasi Perekonomian.

Maksud dan tujuan kegiatan agar dapat menyiapkan bahan rumusan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian.

Kegiatan dengan mengadakan monev pencapaian KUR dengan mengundang Bank Bank penyedia pembiayaan maupun dengan dinas instansi terkait yang mempunyai kelompok usaha. Monev dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020, tanggal 20 Pebruari 2020, 11 Agustus 2020. Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp5.200.000,- realisasi anggaran Rp5.200.000,- (100%) tingkat capaian kegiatan 100%.

11. Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk BUMD dan BUKP agar kinerjanya meningkat

Penyelenggaraan Workshop/Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu :

a) **SOSIALISASI TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD)**

Sosialisasi TPAKD pada kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah tahun 2020 yang bertujuan untuk :

- Penyediaan informasi
- Akses pembiayaan mikro
- Produk dan layanan jasa keuangan
- Terobosan pendanaan pembangunan
- Pembiayaan produktif (UMKM, *start up business*, dan sektor prioritas)

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2020 bertempat di Omah Kampung dengan narasumber Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul; Kepala Kantor OJK DIY dengan tema “Akses Pembiayaan Bagi UMKM” dan Direktur Utama PD **BPR Bank Bantul dengan tema “Layanan PD BPR Bank Bantul Bagi UMKM”**

Adapun peserta yang diundang sebanyak 150 UMKM beserta aparat pemerintah.

Dengan didukung anggaran sebesar Rp204.572.883,- realisasi anggaran Rp122.487.883,- (59,87%) tingkat capaian Kegiatan 85%.

12. Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah

Kajian yang disusun adalah Kajian **“Pengembangan Kelembagaan BUKP dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan pada Masyarakat”** dengan maksud dan tujuan

- a) Meningkatkan Kapasitas Pelayanan BUKP pada masyarakat khususnya perekonomian perdesaan di Kabupaten Bantul
- b) Mengetahui kelembagaan dan potensi BUKP sebagai upaya peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bantul
- c) Menyusun rekomendasi strategi kebijakan pengembangan kelembagaan BUKP guna memperjelas prosedur kewenangan di Kabupaten Bantul.

Kegiatan ini didukung anggaran Rp. 52.100.000 realisasi anggaran sebesar Rp52.095.000,- prosentase mencapai 99,99 % tingkat capaian program 100%

13. Monitoring dan Evaluasi Lembaga Ekonomi Daerah

Monev yang dilaksanakan adalah Monev BUMD sebanyak 7 kali, Monev BUKP sebanyak 5 kali dan monev TPKAD dilaksanakan 3x. Dari kegiatan tersebut akan disusun Rencana Bisnis Perumda Aneka Dharma.

Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp20.625.000,- realisasi Rp20.600.000,- prosentase mencapai 100% tingkat capaian program 100%.

Demikian gambaran secara umum dari pelaksanaan/realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan SKPD bagian Administrasi Perekonomian pada Tahun Anggaran 2020. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian dilihat dari besarnya anggaran sebesar Rp595.074.831,- - realisasi sebesar Rp511.126.683,- (mencapai 85,89%), dengan capaian fisik 100%.

BAB VII. PENUTUP

Pada dasarnya Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan gambaran secara umum dari pelaksanaan/realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan SKPD pada tahun anggaran 2018. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan di Bagian Administrasi Perekonomian dilihat dari besarnya anggaran sebesar Rp

595.074.831, - realisasi sebesar Rp. 511.126.683,- (mencapai 85,89%), dengan capaian 100%.

Selanjutnya diharapkan agar Catatan Atas Laporan Keuangan dalam tahun anggaran 2020 yang disusun ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, Januari 2021
Plt Kepala Bagian Administrasi Perekonomian

SUPARMAN SIP, MHum

NIP. 196802081992031017